

TESIS

**SINKRONISASI DAN HARMONISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**



**ELYAKIM SNEKUBUN
NOMOR MAHASISWA 125201899/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

TESIS

**SINKRONISASI DAN HARMONISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**



**ELYAKIM SNEKUBUN
NOMOR MAHASISWA 125201899/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ELYAKIM SNEKUBUN
Nomor Mahasiswa : 125201899/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan Terhadap Peran Serta Masyarakat
Dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum

Nama Pembimbing

Prof. Dr. Endang Sumiarni,

Dra., SH., M.Hum

Y. Hartono, SH., M.Hum

Tanggal

8 - 2 - 2014

13 - 2 - 2014

Tanda tangan



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PROGRAM PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ELYAKIM SNEKUBUN
Nomor Mahasiswa : 125201899/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan Terhadap Peran Serta Masyarakat
Dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum

Nama Penguji

Tanggal

Tanda tangan

Prof. Dr. Endang Sumiarni,

Dra., SH., M.Hum

27/3-2014

Y. Hartono, SH., M.Hum

27/3 '14

Y. Sri Pudyatmoko, SH., M.Hum

27/03/2014



Ketua Program Studi

PROGRAM
PASCA SARJANA

Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta :

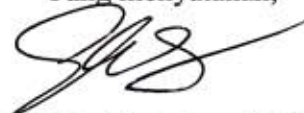
Nama : Elyakim Snekubun, S.H.

NIM/ PRODI : 125201899/ MIH/ Tatanegara

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika tesis ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Maret 2014

Yang menyatakan,



Elyakim Snekubun, S.H.

INTISARI

Judul penelitian hukum ini adalah Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap peran serta masyarakat dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum supaya layak dan adil.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum dan pendekatan politik hukum. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menerapkan lima tugas ilmu hukum dogmatik yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum sinkron dan harmonis. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat pemegang hak atas tanah dalam kedua peraturan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang diharapkan masyarakat dan prinsip kelayakan dalam pemberian ganti kerugian.

Kata-kata kunci : sinkronisasi, harmonisasi, peraturan perundang-undangan, pengadaan tanah, kepentingan umum, peran serta masyarakat, ganti rugi.

ABSTRACT

The title of legal research is Synchronization and Harmonization of Regulation Legislation Against Public Participation In Provision of Compensation for Land Acquisition for Public Interest. This legal research aims to identify and assess the synchronization and harmonization of legislation on public participation in the provision of compensation for land acquisition for the construction of public interest so that a decent and fair.

The method used in this study is a normative legal research methods which focus on setting about the public participation in the provision of land for public interest. The legal approach is the approach of legislation, the historical approach and the political approach. The analytical method used is the method of qualitative analysis by applying the five tasks dogmatic jurisprudence is positive law description, systematization of positive law, positive law analysis, interpretation of positive law and positive law judge.

Act No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for the Public Interest and the Presidential Decree Number 71 Year 2012 on Land Procurement for Development Maintenance For the Public Interest has not been in sync and harmony. Arrangements regarding the role of the community rights over land in the second rule did not meet the expected public sense of justice and the principle of awarding qualifications in losses .

Keywords : synchronization, harmonization, legislation, land acquisition, public interests, public participation, compensation.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis ingin menghaturkan limpah puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak dan rahmat serta tuntunan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul **Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**. Berbagai masalah hukum yang terjadi di Indonesia dewasa ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Pertanyaan yang sering kali dikumandangkan adalah apakah yang salah di negeri ini? Apakah sistem hukumnya? Apakah aparat penegak hukumnya? Ataukah kesadaran hukum masyarakatnya ?.

Menurut penulis, Indonesia sebagai negara yang dominan menganut sistem hukum positif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, tentu memiliki kewajiban membentuk suatu sub sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Jika sistem hukum yang dibentuk adalah baik dan jelas untuk diterapkan, maka harapannya aparat penegak hukum juga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan jelas. Kesadaran hukum masyarakat memang tidak mudah untuk dibangun, namun jika sistem hukum dan aparat penegak hukum memiliki keselarasan maka perjuangan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan lebih mudah. Untuk mencapai keselarasan dalam kehidupan bernegara maka perlu dimulai dari adanya sinkronisasi dan harmonisasi hukum positif sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia.

Sejak tahap awal hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan dan bantuan serta dukungan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Y. Hartono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiran guna membimbing dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, SH. M.Hum., selaku Dosen Penguji Tesis. Terima kasih untuk waktunya dan untuk ilmunya yang telah membantu dan atas segala petunjuk yang baik sehingga penulis dapat melalui ujian ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik, memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan penulis.
6. Ayah dan Ibuku tercinta, Mam Bong Wati dan Bapa Abang, kaka Agnes Snekubun, adik Constantina Snekubun, adik Elias Jeremias Snekubun, yang selalu memotivasi penulis agar lebih semangat dalam belajar dan menyelesaikan seluruh tugas-tugas kuliah.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan Mas Alvin, Mas Budi, Mas Widi, Mas Juni, Mas Lino, Bu Indah, Mba Fefe, Mba Viona, dan semua teman-teman yang tak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah mengajarkan kerjasama dan saling pengertian dalam menciptakan kondisi belajar yang baik.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulisan lebih baik lagi. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang tidak berkenan di dalam tesis ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 5 Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iv
Halaman Pernyataan.....	v
Intisari.....	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang Masalah.....	1
1. Rumusan masalah.....	10
2. Batasan masalah dan batasan konsep.....	10
3. Keaslian penelitian.....	14
4. Manfaat penelitian.....	19
B. Tujuan Penelitian.....	20
C. Sistematika Isi.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang- Undangan.....	22
1. Sinkronisasi.....	22

2. Harmonisasi.....	23
3. Peraturan perundang-undangan.....	25
B. Peran Serta Masyarakat Dalam Pelibatan Penentuan Ganti	
Kerugian Akibat Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan	
Umum.....	28
1. Peran serta masyarakat.....	28
a. Peran serta.....	28
b. Masyarakat.....	29
c. Peran serta masyarakat.....	30
1) Peran serta masyarakat dalam penentuan lokasi	
pengadaan tanah untuk kepentingan umum.....	30
2) Peran serta masyarakat dalam musyawarah penentuan	
bentuk dan besaran ganti kerugian dalam pengadaan	
tanah untuk kepentingan umum.....	31
2. Pelibatan penentuan ganti kerugian pengadaan tanah untuk	
kepentingan umum.....	32
a. Pelibatan.....	32
b. Penentuan ganti kerugian.....	33
c. Pengadaan tanah.....	34
d. Kepentingan umum.....	37
e. Pelibatan penentuan ganti kerugian pengadaan tanah	
untuk kepentingan umum.....	39

C. Landasan Teori.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Data.....	47
1. Bahan hukum primer.....	47
2. Bahan hukum sekunder.....	49
D. Analisis Data.....	50
1. Bahan hukum primer.....	50
2. Bahan hukum sekunder.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Penentuan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	57
1. Gambaran Umum Pengaturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia.....	57
a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.....	57
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.....	62

c.	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	66
d.	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	71
e.	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	77
f.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	82
2.	Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia.....	84
a.	Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia.....	84
b.	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia.....	92

B. Pengaturan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelibatan Penentuan Besaran Ganti Kerugian Akibat Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Agar Layak Dan Adil.....	95
1. Sinkronisasi pengaturan peran serta masyarakat.....	102
2. Harmonisasi pengaturan peran serta masyarakat.....	112
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	